

# Pengaduan Konstitusional Jerman - Jurnal HAM

*by* Tanto Lailam

---

**Submission date:** 14-Jan-2022 03:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1741571058

**File name:** Tanto\_Lailam\_-\_Pengaduan\_Konstitusional\_Jerman.docx (328.06K)

**Word count:** 6999

**Character count:** 50053

**PERAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERAL  
JERMAN (*BUNDESVERFASSUNGSGERICHT*) DALAM PERLINDUNGAN DARI  
PUTUSAN PENGADILAN YANG MELANGGAR HAK FUNDAMENTAL  
WARGA NEGARA**

**Tanto Lailam**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia/  
Academy for European Human Rights Protection, Faculty of Law University of Cologne Germany  
Email: tanto\_lailam@umy.ac.id

**ABSTRACT**

The research focuses on the role of constitutional complaints of the German Federal Constitutional Court (*Bundesverfassungsgericht*) in protecting the fundamental rights of citizens against court decisions that violate human rights and contradict the German Constitution. This research is normative legal research with a statutory/ regulation and case approach. The data analyzed are secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that BVerfG has received 240,251 (98%) cases of constitutional complaints since 1951 (6,000 cases per year), with a success rate of approximately 2% of the total decisions (all objects of dispute). From this data, the most disputed objects are court decisions type (civil court decisions, criminal court decisions, administrative courts, including the decisions of the Land Constitutional Court). The low number of successful decisions is evidence of the very selectiveness of the *Bundesverfassungsgericht* in deciding a legal issue. From the low number of successful decisions, it turns out that many decisions have become references to the Constitutional Court in the world. It is indicated by many requests for translation of decisions from the Constitutional Courts of other countries, both those that adhere to the Continental European and Anglo-Saxon legal systems.

The rate of decisions granted in the disputed object of court decisions by the Constitutional Court is approximately 2% per year.

Keywords: Constitutional Complaint, Constitutional Court, Germany, Fundamental Rights, Court Decisions

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang peran pengaduan konstitusional Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dalam perlindungan hak fundamental warga negara atas putusan pengadilan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan Konstitusi Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang dianalisis adalah data sekunder, meliputi: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BVerfG telah menerima 240.251 (98%) kasus pengaduan konstitusional sejak tahun 1951 (6.000 kasus per tahun), dengan tingkat keberhasilan sekitar kurang lebih 2% dari total putusan (semua objek sengketa). Dari data tersebut objek yang paling banyak disengketakan adalah putusan pengadilan, baik putusan peradilan perdata, putusan peradilan pidana, peradilan administrasi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Negara Bagian. Tingkat putusan yang dikabulkan dalam objek sengketa putusan pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi kurang lebih dari 2% pertahun. Rendahnya putusan yang dikabulkan ini merupakan bukti sangat selektifnya *Bundesverfassungsgericht* dalam memutus sebuah persoalan hukum, dan dari jumlah putusan yang rendah tersebut ternyata banyak putusan yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara di dunia. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan terjemahan putusan dari Mahkamah Konstitusi negara-negara lain, baik yang menganut sistem hukumnya Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon.

Kata kunci: Pengaduan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Jerman, Hak fundamental, Putusan Pengadilan

## PENDAHULUAN

Dalam gelombang reformasi diberbagai negara di dunia, secara global telah memberikan pengaruh terhadap kajian perbandingan hukum tata negara. Praktik terbaik dalam penerapan nilai-nilai demokrasi di negara tertentu menjadi bahan rujukan dalam melakukan reformasi konstitusi di negara yang mengalami transisi demokrasi. Salah satu implikasi dalam gelombang reformasi tersebut adalah pembentukan lembaga baru yang independen dan imparial, yakni Mahkamah Konstitusi (lembaga khusus yang menangani persolan ketatanegaran). Pembentukan mahkamah konstitusi di berbagai negara telah bersifat universal dan telah menjadi bagian penting dari model standar transisi konstitusi dan demokrasi di berbagai negara di dunia, terutama negara-negara yang membongkar pemerintahan dari rezim otoriter ke rezim demokrasi.

Mahkamah konstitusi merupakan organ negara yang didirikan secara konstitusional dan independen yang tujuannya adalah untuk mempertahankan dan menjaga konstitusi sebagai hukum dasar yang tertinggi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan cabang kekuasaan yudikatif yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, memperkuat mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, menciptakan pemerintahan yang bersih, serta melindungi hak fundamental warga negara.<sup>1</sup>

Sebagai organ yudikatif dalam sistem ketatanegaraan (sistem politik), organ ini memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian konstitusionalitas undang-undang dan kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks ini, organ tersebut adalah inti dari gagasan '*neo konstitusionalisme*' atau 'Pengadilan Kelsenian' yang berangkat dari gagasan orisinal Hans Kelsen pada saat penyusunan Konstitusi Austria tahun 1920.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi dalam gagasan Hans Kelsen adalah lembaga yudikatif yang berdiri sendiri sebagai pusat pengujian undang-undang dan penyelesaian problem ketatanegaraan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara di dunia memiliki kesamaan fungsi, yakni sebagai pengawal konstitusi, penafsir sah konstitusi, pengawal proses demokratisasi, dan pelindung hak-hak fundamental warga negara. Kewenangan konstitusional yang diberikan kepada mahkamah konstitusi di setiap negara memiliki banyak kesamaan, namun tetap ada perbedaan, misalnya Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki kewenangan pengaduan konstitusional, sementara Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak memiliki kewenangan tersebut. Perbedaan ini didorong oleh perbedaan sejarah sosial dan politik di masing-masing negara, serta perlunya studi banding yang dilakukan selama proses pendiriannya.

Di Negara Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman lebih dikenal dengan *Bundesverfassungsgericht* (selanjutnya disebut BVerfG). BVerfG ini merupakan lembaga yudikatif tingkat federal, sebab dalam struktur ketatanegaraan Jerman, juga terdapat mahkamah konstitusi yang kedudukannya berada di negara bagian (ada 16 mahkamah konstitusi yang berkedudukan di 16 negara bagian). BVerfG ini bertanggung jawab atas penilaian yudisial terhadap undang-undang (*judicial review*) dan penyelesaian perselisihan di antara kewenangan lembaga negara, termasuk melakukan penilaian terhadap tindakan lembaga-lembaga negara dan putusan pengadilan dalam kasus-kasus individu atau lebih dikenal dengan istilah pengaduan konstitusional.<sup>3</sup>

Pada tahun 2022, *BverfG* telah berusia 71 tahun dengan peranan yang besar dalam sistem ketatanegaraan Jerman. BVerfG ini berkedudukan di Karlsruhe (Kota di Baden-Württemberg, Jerman) dan mulai beroperasi pada tanggal 28 September 1951. Kekuasaan *BverfG* merupakan bentuk dari "*truly extraordinary power*" the "guardian of the constitution" (*Hüter der Verfassung*), penjaga prinsip demokrasi atau "watchdog" sistem legislasi yang baik (pusat demokrasi) dan perlindungan hak-hak fundamental.

Menurut Angelika Nußberger keberadaan BVerfG di Jerman merupakan "*chambers of the heart of the Republic*" (jantungnya negara). BVerfG

2

<sup>1</sup> Tanto Lailam, "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.

<sup>2</sup> Pablo Castillo-Ortiz, "The Dilemmas of Constitutional Courts and the Case for a New Design of Kelsenian Institutions," *Law and Philosophy* 39, no.

6 (2020): 617–655, <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3>.

<sup>3</sup> Jür. Bröhmer, Gisela Elsner, Clauspeter Hill (ed), *70 Years German Basic Law the German Constitution and its Court Landmark Decisions of the Federal Constitutional Court of Germany in the Area of Fundamental Rights*, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Berlin Germany, 2019

juga merupakan pengadilan konstitusional independen paling kuat di dunia dengan serangkaian kompetensi dan dampak putusan terhadap sistem politik yang sangat besar.<sup>4</sup>

BVerfG adalah lembaga negara yang berfungsi untuk memastikan bahwa Konstitusi Republik Federal Jerman (*Grundgesetz/ Basic Law*) dipatuhi oleh negara dan warga negara, dengan fungsi utama memastikan penghormatan dan efektivitas konstitusi yang demokratis dan penegakan hak-hak fundamental secara baik. Kewenangan konstitusional BVerfG meliputi pengujian undang-undang (*abstract and concrete review*), pengaduan konstitusional, perselisihan sengketa pemilu tingkat federal, perselisihan antara lembaga negara tingkat federal, pembubaran partai politik, dan pemakzulan presiden dan hakim federal.

Dalam sambutan Kanselir pertama Jerman Konrad Adenauer pada saat upacara peresmian *BverfG* mengatakan bahwa BVerfG ini berdiri sebagai pilar negara Republik Federal Jerman dan sebagai penjaga tertinggi konstitusi Federal. Keberadaan BVerfG merupakan tantangan sekaligus peluang, tantangannya adalah menerapkan nilai-nilai liberal dan demokrasi dalam budaya politik dan hukum yang skeptis terhadap liberalisme dan demokrasi. Sementara peluangnya untuk melakukan *judicial review* tanpa harus mempertahankan legitimasi demokrasinya.<sup>5</sup> BVerfG memiliki tugas untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh legislator.<sup>6</sup>

Peran BVerfG dalam sistem ketatanegaraan Jerman sangat kuat, bahkan telah memastikan semua lembaga negara dan warga negara telah patuh dan taat pada konstitusi Jerman, terutama dalam penataan tatanan bernegara, perlindungan hak fundamental, dan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>7</sup>

Termasuk menjadi model percontohan di negara-negara yang sedang membangun transisi demokrasi (pembentukan MK), termasuk di Indonesia. Pada amandemen UUD 1945 ketiga, BVerfG menjadi salah satu rujukan yang pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Peran BVerfG yang sangat kuat tersebut terutama dalam pelaksanaan kewenangan pengaduan konstitusional yang dikenal sebagai *verfassungsbeschwerde*, dimana setiap warga negara (bukan hanya otoritas publik tertentu) memiliki akses keadilan pada kewenangan ini, dan penggunaan saluran ini jauh lebih signifikan daripada kewenangan konstitusional lainnya.<sup>9</sup> Sejak tahun 1951 hingga saat ini, BVerfG telah menyelesaikan kasus pengaduan konstitusional sebesar 240.251 (98%).<sup>10</sup> Dari jumlah tersebut, sekitar kurang lebih 6.000 kasus pengaduan konstitusional per tahun telah diselesaikan secara baik oleh MK.

Peran penting BVerfG dalam sistem ketatanegaraan Jerman yang sangat kuat, terutama dalam perlindungan hak fundamental warga negara inilah yang menjadi dasar pemikiran dan latar belakang dalam penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan kewenangan pengaduan konstitusional, objek sengketa dalam kewenangan tersebut, dan kinerja putusan pengaduan konstitusional hingga tahun 2020, serta uraian beberapa kasus menarik (*landmark decision*) pada tahun 2020.

7 Beberapa kasus menarik seperti putusan mengenai larangan penyembelihan hewan. Hal itu dipicu oleh adanya kebijakan Pemerintah Jerman yang melarang penyembelihan hewan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan.<sup>11</sup> Kasus lainnya seperti reformasi perjanjian (Perjanjian Maastricht atau

<sup>4</sup> Angelika Nußberger, 2015, *The European Court of Human Rights and the German Federal Constitutional Court*, access on [https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/the-echr-and-the-german-constitutional-court\\_angelika-nussberger.pdf](https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/the-echr-and-the-german-constitutional-court_angelika-nussberger.pdf)

<sup>5</sup> Collings Justin, *Democracy's Guardians: A History of the German Federal Constitutional Court 1951–2001*, Oxford University Press, United Kingdom, 2015

<sup>6</sup> Jöhmer, *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Sara Poli and Roberto Cisotta, "The German Federal Constitutional Court's Exercise of Ultra Vires Review and the Possibility to Open an Infringement

<sup>12</sup> Action for the Commission," *German Law Journal* 11, no. 5 (2020): 1078–1089.

<sup>8</sup> I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights," *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 1.

<sup>9</sup> M. Lutfi Chakim, "A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions," *Constitutional Review* 9, no. 1 (2019): 096.

<sup>10</sup> Pan Mohamad Faiz, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court," *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 103.

<sup>11</sup> Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak



Perjanjian Lisbon),<sup>12</sup> dan kasus-kasus lainnya. Begitu pula kasus-kasus yang objek sengketaanya putusan pengadilan, baik putusan *Bundesgerichtshof* (Mahkamah Agung: pengadilan perdata dan pengadilan pidana). *Bundesverwaltungsgericht* (pengadilan administrasi, dan lainnya).

Dalam kajian *literature review*,<sup>2</sup> terdapat beberapa penelitian atau artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, yakni: Donald P Kommers, and Russell A Miller,<sup>13</sup> yang memaparkan kewenangan *BverfG* secara umum, dan tidak memfokuskan pada pengaduan konstitusional secara komprehensif. Selain itu, I Dewa Gede Palguna<sup>14</sup> yang memaparkan urgensi pengaduan konstitusional sebagai upaya perlindungan hak konstitusional dengan membandingkan dengan *BverfG* Jerman. M. Luthfi Chakim<sup>15</sup> memfokuskan pada perbandingan kewenangan pengaduan konstitusional di beberapa negara, termasuk Jerman. Namun tidak menguraikan secara komprehensif tentang peran *BverfG* dalam perlindungan hak konstitusional dari putusan pengadilan. Sementara itu, Hamdan Zoelva<sup>16</sup> dan Pan Muhammad Faiz<sup>17</sup> menguraikan urgensi pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi yang memfokuskan pada prospek dan peluang pelebagaan kewenangan pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Berdasarkan uraian di atas, kebaruan penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan kewenangan *BverfG* dalam pengaduan konstitusional yang memfokuskan perlindungan terhadap putusan pengadilan yang melanggar hak fundamental warga negara. Uraian secara mendalam mengenai objek sengketa dalam kewenangan tersebut, dan kinerja putusan pengaduan konstitusional hingga tahun 2020 khususnya dalam jenis objek sengketa putusan pengadilan, serta uraian beberapa kasus menarik pada tahun 2020. Penelitian ini memiliki urgensi dengan tujuan ingin mengetahui peran *BverfG* dalam menjalankan kewenangan pengaduan konstitusional Jerman secara komprehensif, dan

yang lebih penting sebagai bahan kajian perbandingan hukum bagi Indonesia jika suatu saat melakukan pelebagaan pengaduan konstitusional pada MKRI.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memfokuskan pada peran pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dalam perlindungan hak fundamental warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada kajian norma-norma hukum, baik konstitusi Jerman (*the Basic Law*), Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman, dan putusan-putusan pengaduan konstitusional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan *BverfG*), bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai literatur jurnal, buku, dan lainnya. Sementara bahan hukum tersier merupakan dokumen-dokumen yang memberikan petunjuk dalam penelitian ini, misalnya kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mencari, membaca, menganalisis bahan-bahan yang diperoleh melalui data-data pada perpustakaan dan dokumen-dokumen online (jurnal online). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif dimaksudkan adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan atas objek penelitian dengan melakukan kategorisasi data yang meliputi tahapan, yaitu: (1) data disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti; (2) data yang telah disistematisasi, kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; (3) data yang telah diuraikan kemudian dievaluasi dan dianalisis, dinilai dengan menggunakan ukuran hukum yang berlaku dan politik hukum yang akan datang. Langkah ini

Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 152–165.

<sup>12</sup> Dieter Grimm, Matthias Wendel and Tobias Reinbacher., "European Constitutionalism and the German Basic Law", Anneli Albi and Samo Bardutzky (ed), *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law (National Reports)*, Asser Press, Netherlands, 2019, p.415

<sup>6</sup> Donald P. Kommers and Russell A. Miller, "Das Bundesverfassungsgericht: Procedure, Practice and Policy of the German Federal Constitutional Court," *Journal of Comparative Law* 3, no. 2 (2008): 194–211.

<sup>14</sup> I Dewa Gede Palguna, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> M. Luthfi Chakim, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Hamdan Zoelva, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Pan Mohamad Faiz, *Loc.Cit.*

dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara mendalam dan komprehensif.

## PEMBAHASAN

### 1. Mahkamah Konstitusi di Negara Jerman

Jerman adalah negara federasi terdiri dari 16 negara bagian yang disebut *Land* (jamak *Länder*) atau *Bundesland*. Struktur ketatanegaraan saling berhubungan, namun negara bagian memiliki konstitusi dan otonomi penyelenggaraan negara sendiri. Hubungan negara federal dan negara bagian sangat kuat, misalnya setiap negara bagian memiliki perwakilan pada tingkat federal dalam *Bundesrat*. *Bundesrat* ini merupakan Majelis Federal/ Parlemen pemerintah-pemerintah negara bagian (*Parlament der Laenderregierungen*). *Bundesrat* merupakan sebuah lembaga legislatif dalam Parlemen Jerman yang terdiri dari perwakilan negara-negara bagian, yang anggotanya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi pejabat pemerintah negara bagian yang diberikan kuasa atas nama negara bagian tersebut. *Bundesrat* ini juga memiliki kewenangan dalam pengusulan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Federal (BVerfG).

Dalam struktur ketatanegaraan negara Jerman, tingkat federal maupun tingkat negara bagian (*state/land*) memiliki Mahkamah Konstitusi yang berbeda. Mahkamah Konstitusi pada tingkat federal disebut *Bundesverfassungsgericht* (BVerfG) yang berkedudukan di Karlsruhe, Baden-Württemberg, Jerman. Kewenangan *Bundesverfassungsgericht* (BVerfG) ini meliputi: pengujian undang-undang/pengujian konstitusional (peninjauan undang-undang dalam konteks abstrak dan konkrit), pengaduan konstitusional, perselisihan pemilihan umum tingkat federal, perselisihan antara lembaga negara federal pembubaran partai politik, dan pemakzulan presiden federal dan hakim.

Enam belas (16) negara bagian juga memiliki mahkamah konstitusi tersendiri yang fungsinya adalah menjaga dan memberikan penafsiran atas konstitusi negara bagian. Mahkamah Konstitusi Negara bagian di Jerman yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Baden-Württemberg (*Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg/VerfGH BW*)<sup>18</sup>
2. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Bavaria/*Bayerischer Verfassungsgerichtshof/ VerfGH BY*.<sup>19</sup>
3. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Berlin (*Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin VerfGH BE*)<sup>20</sup>
4. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Brandenburg (*Verfassungsgericht des Landes Brandenburg/ VerfG BB*).<sup>21</sup>
5. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Bremen (*Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen/ StGH HB*)<sup>22</sup>
6. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Hamburg (*Hamburgisches Verfassungsgericht/ VerfGH HH*)<sup>23</sup>
7. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Hessen (*Staatsgerichtshof des Landes Hessen/ StGH HE*)<sup>24</sup>
8. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Mecklenburg-Western Pomerania (*VerfG MV*)<sup>25</sup>
9. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Niedersachsen (*StGH NDS*)<sup>26</sup>
10. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian North Rhine-Westphalia (*VerfGH NRW*)<sup>27</sup>
11. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian

<sup>18</sup> Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg, <https://verfgh.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/> diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>19</sup> Bayerischer Verfassungsgerichtshof, <https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/bayverfgh/> diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>20</sup> Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, <https://www.berlin.de/gerichte/sonstige-gerichte/verfassungsgerichtshof/> diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>21</sup> Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, <https://verfassungsgericht.brandenburg.de/verfghbbg/> de, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>22</sup> Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen, <https://www.staatsgerichtshof.bremen.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>23</sup> Hamburgisches Verfassungsgericht, <https://www.hamburgisches-verfassungsgericht.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>24</sup> Staatsgerichtshof des Landes Hessen, <https://staatsgerichtshof.hessen.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>25</sup> Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern <https://www.mv-justiz.de/gerichte-und-staatsanwaltschaften/landesverfassungsgericht/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>26</sup> Niedersächsischen Staatsgerichtshofs <https://staatsgerichtshof.niedersachsen.de/startseite/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>27</sup> Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen, <https://www.vgh.nrw.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

- Rhineland-Palatinate (*VerfGH RP*)<sup>28</sup>
12. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Saarland (*VerfGH SL*)<sup>29</sup>
  13. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Saxony (*VerfGH SN*)<sup>30</sup>
  14. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Saxony-Anhalt (*VerfGH ST*)<sup>31</sup>
  15. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Schleswig-Holstein (*VerfGH SH*)<sup>32</sup>
  16. Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Thuringian (*VerfGH TH*).<sup>33</sup>

Kewenangan 16 mahkamah konstitusi di negara bagian ini ada persamaan dan ada perbedaannya, beberapa kewenangan mahkamah konstitusi tersebut terkait dengan: (1) kewenangan dalam memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan penafsiran terhadap Konstitusi negara bagian, (2) pengujian konstitusional (proses peninjauan abstrak dan konkrit/ spesifik), (3) untuk memeriksa dalam proses peninjauan preventif atas permintaan pemerintah atau anggota *Landtag* terkait permohonan untuk amandemen Konstitusi negara bagian; (4) proses peninjauan regulasi di produk Pemerintah Kota; (5) memutus dakwaan oleh mayoritas *Landtag* yang memenuhi syarat terhadap seorang anggota parlemen yang dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya (menguntungkan dirinya); (6) memutus dakwaan menteri *Landtag* terhadap anggota pemerintah karena pelanggaran yang disengaja/ sangat lalai terhadap konstitusi atau undang-undang; (7) memutus persoalan pemilihan umum pada *Landtag*/ negara bagian; (8) memutus persoalan referendum; (9) memutus persoalan pengaduan konstitusional, dan memutus pengaduan atas keterlambatan otoritas publik dalam memnuhi hak konstitusional warga negara (*complaints of delay*).

## 2. Peran Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Meningkatnya kesadaran akan pertanyaan hak asasi manusia akibat penyalahgunaan kekuasaan negara, telah menyebabkan pengenalan atau perluasan mekanisme hukum yang ada untuk perlindungan hak dan kebebasan konstitusional di banyak negara. Tanpa ragu mekanisme hukum yang paling kuat di antara mekanisme perlindungan hak konstitusional adalah pengaduan konstitusional.<sup>34</sup>

Tujuan utama dari Mahkamah Konstitusi dibentuk adalah untuk menjamin penghormatan konstitusi dari semua otoritas publik tidak hanya dari prosedurnya tetapi juga dari aspek material, yaitu isinya. Dengan cara ini konstitusi tidak lagi dianggap semata-mata sebagai dokumen politik belaka yang tunduk pada kebijaksanaan/ kebijakan politik (sistem politik), tetapi semua sistem politik harus tunduk dan patuh pada amanah konstitusi. Konstitusi adalah yang dijaga oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah nilai dan norma hukum yang tertinggi atau dasar negara.

Menurut Denis Preshova,<sup>35</sup> khususnya di Eropa bahwa tugas pengujian konstitusional / pengaduan konstitusional ini tidak dapat dipercayakan kepada pengadilan biasa melainkan kepada suatu mahkamah konstitusi karena beberapa alasan, yaitu: *pertama, legal certainty* (kepastian hukum). Mahkamah konstitusi akan mampu memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa dalam melakukan pengujian konstitusional (pengujian konstitusional merupakan bagian dari pengujian konstitusional). Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya doktrin *stare decisis* atau prinsip preseden di negara-negara *civil law* seperti kebanyakan negara-negara Eropa. *Kedua, Expertise* (kompetensi). Klaim menyatakan bahwa hakim biasa pada peradilan umum di negara-

<sup>28</sup> Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, <https://verfgh.justiz.rlp.de/de/startseite/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>29</sup> Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes, <http://www.verfassungsgerichtshof-saarland.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>30</sup> Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen, <https://www.verfassungsgerichtshof.sachsen.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>31</sup> Verfassungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, <https://verfassungsgericht.sachsen-anhalt.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>32</sup> Schleswig-Holsteinisches Landesverfassungsgericht <https://www.schleswig->

[holstein.de/DE/Justiz/LVG/lvg\\_node.html](holstein.de/DE/Justiz/LVG/lvg_node.html), diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>33</sup> Thüringer Verfassungsgerichtshof, [http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/\\$\\$serviceliste/startseite.thverfgh?opendocument&thverfgh&startseite](http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/$$serviceliste/startseite.thverfgh?opendocument&thverfgh&startseite), diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>34</sup> Gerhard Dannemann, (1994), Constitutional Complaints: The European Perspective, *International and Comparative Law Quarterly*, 43(1), 142–153.

<sup>35</sup> Denis Preshova, 2019, *On the Rise While Falling: the New Roles of Constitutional Courts in the Era of European Integration*, Ph.D Thesis in Universität zu Köln Germany

negara *civil law*, yang merupakan hakim karir, tidak memiliki keahlian untuk tingkat penalaran hukum abstrak tertinggi yang diperlukan oleh pengujian konstitusional yang sering melibatkan analisis yang kompleks mengenai norma hukum dan pertimbangan dalam undang-undang (filosofis, sosiologis, yuridis). *Ketiga, separation of powers and democratic legitimacy*. Pengujian konstitusional dapat menimbulkan keberatan atau bahkan penolakan terutama di negara yang menganut doktrin kedaulatan parlementer. Artinya keberadaan mahkamah konstitusi terkait dengan persoalan legitimasi dan kontrol atas kebijakan yang didasarkan pada suara mayoritas/ perlemen (counter-majoritarian). Dalam hal ini pengujian dan pengaduan konstitusional oleh BVerfG berfungsi sebagai alat kontrol suara mayoritas di parlemen.

Pengaduan konstitusional merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memperkuat jaminan hak fundamental warga negara terhadap setiap tindakan negara/ pemerintah/ penyelenggara negara di semua cabang kekuasaan. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang melanggar hak fundamental warga negara, selain itu mencakup juga kelalaian pemerintah yang menyebabkan kerugian hak fundamental warga negara. *The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)* memberikan pengertian bahwa "pengaduan konstitusional dapat diajukan oleh individu yang hak-hak fundamentalnya telah dilanggar oleh tindakan otoritas negara".

Ayse Özkan Duvar<sup>36</sup> menyebutkan bahwa didalam sistem hukum Eropa Kontinental, pengaduan konstitusional ditempatkan sebagai instrumen hukum yang luar biasa dan spesifik (khusus), yang hanya dapat digunakan jika tatanan hukum nasional lainnya (kekuasaan negara) tidak memberikan solusi terhadap perlindungan hak fundamental warga negara yang dilanggar. Hal ini berarti bahwa warga negara dapat menggunakan pengaduan konstitusional setelah semua mekanisme hukum yang ditempuh sudah tidak ada lagi.

Menurut Kommers and Miller<sup>37</sup> "individu dan entitas yang diberi hak fundamental tertentu dapat mengajukan pengaduan konstitusional. Menurut I Dewa Gede Palguna<sup>38</sup> menyatakan bahwa pengaduan konstitusional mengacu pada tindakan

warga negara yang mengklaim bahwa salah satu hak fundamentalnya telah dilanggar oleh pejabat publik.

Pengaduan konstitusional adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang kepada Mahkamah Konstitusi terhadap tindakan (atau pembiaran) suatu lembaga publik yang mengakibatkan dilanggarnya hak-hak fundamental yang bersangkutan. Bentuk tindakan pejabat publik yang dimaksud adalah tindakan atas implementasi kewenangan kekuasaan pemerintahan, putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional, dan undang-undang yang melanggar hak konstitusional, termasuk kesalahan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian bagi warga negara.

Maksud dari pengaduan konstitusional ini adalah agar setiap orang atau kelompok tertentu memiliki kebebasan dan persamaan kedudukan dalam berpartisipasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk tanggung jawab untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Hamdan Zoelva<sup>39</sup> mengatakan bahwa pengaduan konstitusional adalah bentuk pengaduan warga melalui proses peradilan di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau pengabaian oleh negara, dalam hal ini lembaga negara yang melanggar hak asasi manusia.<sup>39</sup>

Gerhard Dannemann mengkarakterisasi pengaduan konstitusional dengan empat faktor, *pertama*, adanya upaya hukum untuk memulihkan hak-hak fundamental atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik/negara; *kedua*, sistem peradilan yang menitikberatkan pada konstitusionalitas perbuatan yang bersangkutan dan bukan dengan persoalan hukum lain yang terkait dengan perkara yang sama (pengujian konstitusional/ pengujian undang-undang); *ketiga*, penyelesaian kewenangan ini dapat diajukan oleh orang yang terkena dampak negatif dari tindakan penyelenggara negara; dan *keempat*, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutus gugatan/ permohonan pengaduan konstitusional berwenang dan memulihkan hak-hak fundamental pemohon.<sup>40</sup>

Beberapa alasan mengapa pengaduan konstitusional harus menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu: <sup>41</sup> *pertama*, perwujudan nilai-nilai

<sup>36</sup> Ayse Özkan Duvar, "Possible Effects of the Constitutional Complaint Mechanism on Human Rights Practices," *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul* 45, no. 62 (2013): 29-42, <http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuafdi/article/view/5000121143>.

<sup>37</sup> Donald P. Kommers and Russell A. Miller, *Loc.Cit.*

<sup>38</sup> I Dewa Gede Palguna, *Loc.Cit.*

<sup>39</sup> Hamdan Zoelva, *Loc.Cit.*

<sup>40</sup> Gerhard Dannemann, *Loc.Cit.*

<sup>41</sup> Tanto Lailam, 2021, *Constitutional Complaint (Pelaksanaan Kewenangan Bundesverfassungs-*



konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai bagian dari cabang kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusionalisme dan supremasi hukum. Inti dari perwujudan nilai-nilai konstitusional dalam suatu negara hukum adalah setiap persoalan hukum dapat diselesaikan secara adil dan transparan melalui mekanisme peradilan yang independen dan imparial. Pengaduan konstitusional harus ada dengan membangun kerangka pemikiran tentang nilai-nilai konstitusionalisme dan supremasi hukum. Jika tidak ada, berarti negara belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai konstitusionalisme.

*Kedua, sistem check and balances.* Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas keseimbangan kelembagaan negara/ saling kontrol – saling imbang antar lembaga-lembaga negara, tujuannya adalah menciptakan sistem ketatanegaraan dimana posisi dan peran masing-masing lembaga negara harus sama-sama kuat dan saling mengontrol dalam hubungan *checks and balances*, tidak boleh ada yang lebih unggul atau kuat yang dapat mempengaruhi/ mengintervensi lembaga negara lainnya.<sup>42</sup>

*Ketiga, dasar perlindungan hak asasi manusia.* Konstitusi harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar tidak dilakukan/tidak terpenuhi oleh negara. Dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak fundamental tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa harus bersifat komprehensif, jangan sampai terjadi kesenjangan/atau ketiadaan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Artinya bahwa pengaduan konstitusional melekat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

*Keempat, pemerintahan yang baik dan bersih.* Dalam sebuah negara yang demokratis memerlukan pengaduan konstitusional untuk mewujudkan *good governance*, misalnya penyelenggara negara yang salah menafsirkan undang-undang harus diluruskan melalui pengaduan konstitusional.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Federal Jerman, BVerfG merupakan lembaga negara tingkat Federal yang sangat penting dalam

*gericht Jerman dan Pelembagaan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*), Laporan Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, tidak diterbitkan.

<sup>42</sup> Tanto Lailam, "Problem dan Solusi Penataan *Checks and Balances System* dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, h.119

melindungi konstitusi Republik Federal (*the Basic Law*), mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi modern. Dalam konteks budaya hukum, BVerfG telah membentuk budaya hukum yang berkualitas dan berkepastian hukum. Selain itu BVerfG telah mengimplementasikan hak fundamental di bawah prinsip-prinsip konstitusionalisme baru di Eropa, termasuk melalui pelaksanaan fungsi pengaduan konstitusional.

Pengaduan konstitusional yang diadopsi dalam Undang-Undang GFCC pada tahun 1951 telah berkembang menjadi "sahabat/ kerabat" warga negara dalam mengajukan penyelesaian atas pelanggaran hak konstitusional yang dialaminya.<sup>43</sup> Sebagai "sahabat" artinya mekanisme pengaduan konstitusional tidak membebani masyarakat, akses keadilannya sangat dekat (permohonannya bisa dibuat oleh setiap warga negara), prosesnya mudah, dan waktu penyelesaian maksimal 1 bulan (jelas dan berkepastian hukum).

Jumlah putusan BVerfG dari tahun 1951 hingga 2020:

Tabel 1.  
Jumlah Putusan BVerfG

No	Kewenangan	Putusan
1.	Constitutional Review/ Judicial Review	3955 (1,62%)
2.	Constitutional Complaint	240.251 (98,04%)
3.	Dispute between Constitutional Organs	368 (0,155%)
4.	Dissolution of Political Parties	10 (0,004%)
5.	Impeachment of President and Vice President	0 (0%)
6.	Federal Election Disputes/ Electoral Complaint	447 (0,18%)
	Total	245.071 (100%)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah total putusan BVerfG adalah 245.071 kasus, dalam jumlah tersebut sekitar 98,03% (240.251 kasus) merupakan putusan berkategori putusan pengaduan konstitusional. Putusan pengaduan konstitusional ini menunjukkan bahwa peran terbaik BVerfG adalah melindungi hak-hak individu. Pengaduan konstitusional membuka landasan baru sebagai bagian dari pengujian konstitusional yang mencerminkan tradisi sistem hukum yang panjang di Jerman. Mekanisme pengaduan konstitusional baru dibentuk (awalnya)

<sup>43</sup> Anja Seibert-Fort, "Judicial Independence and Democratic Accountability: The German Function and Legitimacy of the German Federal Court", in Ernest Hirsch Balin, Gerhard van der Schyff, Marteen Stremler (Ed), *European Yearbook of Constitutional Law 2019: Judicial Power: Safeguards and Limit in Democratic Society*, Asser Press and Springer, Berlin-Germany, 2020

berdasarkan undang-undang belaka. Kemudian diperkuat melalui amandemen konstitusi pada tanggal 1969, dalam amandemen konstitusi ditambahkan kewenangan BVerfG dalam pengaduan konstitusional, khususnya pada Pasal 93 (1) No. 4a dan b Konstitusi Federal Jerman.

Pasal 93(1) No 4a dan b Konstitusi Jerman:

- a. Pasal 93 (1) No. 4a Konstitusi Jerman: tentang pengaduan konstitusional, yang dapat diajukan oleh setiap orang yang mengklaim bahwa <sup>10</sup> adalah satu hak fundamentalnya atau salah satu haknya berdasarkan Pasal 20 ayat (4), atau berdasarkan Pasal 33, 38, 101, 103 atau 104 telah dilanggar oleh otoritas publik. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pengaturan hak-hak fundamental warga negara.
- b. Pasal 93 (1) No.4b Konstitusi Jerman: tentang pengaduan konstitusional yang diajukan oleh kotamadya atau asosiasi kotamadya atas dasar bahwa hak konstitusionalnya untuk memerintah sendiri berdasarkan Pasal 28 telah dilanggar oleh undang-undang; dalam hal pelanggaran oleh konstitusi Negara bagian, bagaimanapun, hanya jika hukum tidak dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi negara bagian tersebut.

Pasal 90 (§90 et seq) dari Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz*) mengatur rincian lebih lanjut:

- a. Pasal 90 (1): Setiap orang yang menuntut pelanggaran salah satu hak fundamentalnya atau salah satu haknya berdasarkan Pasal 20(4), Pasal 33, 38, 101, 103 dan 104 Konstitusi Jerman oleh otoritas publik dapat mengajukan pengaduan konstitusional ke BVerfG.
- b. Pasal 90 (2): Jika ada upaya hukum ke pengadilan lain, pengaduan konstitusional hanya dapat diajukan setelah semua upaya hukum selesai dilakukan. Namun, BVerfG dapat memutuskan pengaduan konstitusional yang diajukan sebelum semua upaya hukum dilakukan jika pengaduan tersebut relevan secara umum atau jika upaya sebelumnya ke pengadilan lain akan menyebabkan kerugian yang parah dan tidak dapat dihindari bagi pemohon.
- c. Pasal 90 (3): Hak untuk mengajukan permohonan/ gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Negara bagian menurut ketentuan konstitusi Negara bagian tetap tidak tidak memiliki keterikatan.

Dalam pengaduan konstitusional, setiap orang dapat mengajukan pengaduan konstitusional yang mengklaim bahwa tindakan otoritas publik

telah secara langsung melanggar hak-hak fundamental mereka/ atau hak-hak yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 1-19 Konstitusi Jerman yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Tindakan otoritas publik yang dipermasalahkan dalam pengaduan konstitusional sebagian besar adalah putusan pengadilan tingkat federal.

Pengaduan konstitusional harus diajukan, dan alasannya dinyatakan dalam waktu satu bulan (Pasal 93 Undang-undang MK Jerman/ BVerfG), Setiap orang dapat mengajukan aduan konstitusional untuk menegaskan hak-hak fundamental mereka *vis-à-vis* negara. Pengaduan konstitusional ini bukan proses banding di pengadilan biasa, namun merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya memeriksa apakah prinsip-prinsip konstitusionalisme telah dilanggar oleh penyelenggara negara.

Dalam praktiknya di BVerfG, pengaduan konstitusional juga memiliki kompetensi untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, meskipun BVerfG memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dalam uji materi undang-undang yang abstrak dan pengujian undang-undang yang spesifik. Proses penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional mudah dan murah. Pengadu mengajukan aplikasi dan alasan, dan sebagian besar pengaduan disiapkan tanpa bantuan pengacara (kurang lebih 1/3 dari jumlah kasus yang menggunakan jasa pengacara), dan tidak ada biaya pengajuan atau surat resmi yang diperlukan. Selain itu, putusannya tidak memakan waktu lama, hanya satu bulan.

Penyelesaian kasus ini dilakukan oleh dua Senat (Senate) pada BVerfG, masing-masing terdiri dari delapan Hakim Konstitusi. Distribusi kasus antara dua Senat tergantung pada jenis dan pokok bahasan persidangan. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran hukum antara Senat, keputusan dibuat oleh Hakim kedua Senat secara bersama-sama dalam Pleno. Tidak semua keputusan memerlukan keterlibatan kedelapan Hakim Senat. Setiap Senat membentuk tiga Kamar (Kammern), yang dapat memutuskan sendiri sejumlah besar pengaduan konstitusional selama pertanyaan hukum utama yang dipermasalahkan telah diputuskan oleh

Senat.<sup>44</sup>

Pengaduan konstitusional harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Jerman dan harus menyertakan alasan-alasan ini sesuai dengan Pasal 23(1) dan 92 Undang-undang BVerfG. Setidaknya, alasannya harus mencakup informasi berikut:<sup>45</sup>

- a. Tindakan otoritas publik (putusan pengadilan, tindakan administratif, undang-undang) yang dipersoalkan dalam pengaduan konstitusional harus ditentukan secara tepat (kapan putusan pengadilan dan tindakan administratif dipersengketakan, dan dokumen putusan, dan tanggal dan hari putusan).
- b. Hak fundamental atau hak yang setara yang diduga dilanggar oleh tindakan otoritas publik yang dipersengketakan harus jelas atau setidaknya ditentukan isi hukumnya, alasan-alasan permohonan sengketa, termasuk menjelaskan alasan-alasan mengapa objek sengketa melanggar hak-hak fundamental.
- c. Terlepas dari putusan yang dipersoalkan, dokumen lain dari proses awal (misalnya laporan singkat yang relevan, risalah dengar pendapat, pendapat ahli) harus diserahkan dan dijelaskan relevansinya.
- d. Jika pengaduan konstitusional mempersoalkan putusan pengadilan dan/atau administratif, alasan yang dikemukakan harus menunjukkan bahwa semua upaya hukum, permohonan pengaduan telah habis dalam proses persidangan di pengadilan umum (sesuai kewenangan peradilan) untuk menghindari problem hukum terhadap pelanggaran hak fundamental yang diklaim.
- e. Permohonan dan dokumen lain yang diserahkan ke BVerfG menjadi bagian dari dokumen pengadilan, dan dengan demikian, umumnya tidak dikembalikan. Oleh karena itu, pemohon hanya mengirimkan permohonan dan fotokopi dokumen lain dalam satu file/ dokumen.

Berkaitan dengan peran BVerfG dalam pengaduan konstitusional, BVerfG telah menerima 240.251 kasus sejak tahun 1951, dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 kasus pengaduan konstitusional per tahun diselesaikan. Dua majelis senat yang menyelesaikan beban kerja ini. Dalam praktiknya, putusan pengaduan konstitusional dalam BVerfG ada beberapa jenis/ kelompok objek

sengketa:<sup>46</sup> *Court Decisions* (putusan pengadilan), *Laws and Ordinances* (undang-undang dan prosedur administrasi negara); *Omissions on the part of the Legislator* (kelalaian legislator), *Other Sovereign Acts of European Authorities* (kewenangan lain dari Uni Eropa), *Other Sovereign Acts of The Highest Federal Authorities* (kewenangan lain dari lembaga tinggi negara), *Other Sovereign Acts of Land Authorities* (kewenangan lain dari negara bagian), *Other Sovereign Acts of Municipal Authorities* (kewenangan lain dari Pemerintah Kota), dan *Other General object of legal Challenges* (objek sengketa hukum umum).

Kewenangan-kewenangan lain dari beberapa lembaga tersebut menjadi objek sengketa di BVerfG, objek sengketa ini sangat luas yang pada pokoknya dapat diajukan ke BVerfG. Alasan disebut kewenangan utama lembaga-lembaga lain merupakan kewenangan yang dapat diajukan dalam sistem peradilan pada tingkat negara bagian (misalnya Undang-undang yang dibuat oleh legislator negara bagian menjadi kewenangan pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Negara Bagian). Artinya hanya kewenangan lain dari lembaga-lembaga tersebut diatas (misalnya kewenangan lain negara bagian) yang menjadi kewenangan BVerfG.

Tabel 2.  
Objek Putusan

No	Type of Cases	2018	2019	2020
1.	Court Decisions	5.228	4.693	4.462
2.	Laws and Ordinances (Directly)	96	70	237
3.	Omissions on the part of the Legislator	2	6	1
4.	Other Sovereign Acts of European Authorities	5	6	4
5.	Other Sovereign Acts of the Highest Federal Authorities	18	23	37
6.	Other Sovereign Acts of Land Authorities	103	129	121
7.	Other Sovereign Acts Acts of Municipal Authorities	11	12	9
8.	Other General object of legal Challenges	215	219	323
Total		5.678	5.158	5.194

Objek sengketa putusan pengadilan federal dalam skema pengaduan konstitusional (*Verfassungs-beschwerde*) adalah keluhan utama terhadap putusan (*Urteilsbeschwerde*), di mana BVerfG akan menilai putusan pengadilan (sesuai

<sup>44</sup> Bröhmer, *Landmark Decisions of the Federal Constitutional Court of Germany in the Area of Fundamental Rights*.

<sup>45</sup> Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949 Last amended on 28 March 2019 and

<sup>46</sup> *Bundesverfassungsgericht, Report 2020*



kompetensinya) dalam penerapan hukum, apakah putusnya melanggar hak fundamental warga negara atau tidak?. Penilaian ini tentu berdasarkan pada norma dan nilai hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Jerman. Dalam konteks ini, tidak ada perlawanan dari hakim (pengadilan) untuk tidak mengikuti yurisprudensi BVerfG,<sup>47</sup> sebab jika melakukan perlawanan dan ternyata terbukti bahwa hakim dalam membuat putusan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, maka hakim tersebut akan terlihat *track record*-nya.

Terkait dengan objek sengketa putusan pengadilan dalam praktik, BVerfG telah menyelesaikan kasus dengan jumlah total pengaduan konstitusional dari kewenangan kedua senat dari tahun 2018 -2020, yaitu:<sup>48</sup>

Tabel 3.

Objek Putusan Pengadilan

No	Type of Court Decisions	2018	2019	2020
1.	Civil Court	2.387	1.837	1.702
2.	Criminal Court	1.250	1.322	1.215
3.	Administrative Court	775	733	810
4.	Social Courts	498	432	426
5.	Labour Courts	149	174	127
6.	Finance Courts	114	137	131
7.	Patents Courts	4	2	2
8.	Disciplinary court, professional disciplinary tribunals, Federal Court of Justice in Lawyer and Notary Matters	24	29	15
9.	Land Constitutional Courts	27	27	34
Total		5.228	4.693	4.462

Berdasarkan data tabel di atas, sebagian besar perkara gugatan/permohonan pengaduan konstitusional pada tahun 2018-2020 adalah putusan pengadilan. Rincian putusan pengaduan konstitusional berdasarkan objek sengketa putusan pengadilan federal adalah sebagai berikut:

- a. *Bundesgerichtshof/ Federal Court of Justice* (pengadilan federal), meliputi: *civil court* (pengadilan perdata) dan *criminal court* (pengadilan pidana).<sup>49</sup>
- b. *Bundesverwaltungsgericht/ administrative court* (pengadilan administrasi);<sup>50</sup>
- c. *Bundessozialgericht/ social court* (pengadilan masalah sosial)<sup>51</sup>
- d. *Bundesarbeitsgericht/ labour court* (pengadilan ketenagakerjaan/ perburuhan);<sup>52</sup>
- e. *Bundesfinanzhof/ finance or fiscal court* (pengadilan pajak/fiskal);<sup>53</sup>
- f. *Bundespatentgericht (paten court)/* pengadilan paten);<sup>54</sup>
- g. Disciplinary court, professional disciplinary tribunals, federal court of justice in lawyer and notary matters (pengadila etika/ kedisiplinan, pengadilan etika profesional, pengadilan federal yang menangani problematika pengacara dan notaris).
- h. *Land constitutional courts* (Mahkamah Konstitusi Negara Bagian).

Rata-rata setiap tahun putusan BVerfG yang mengabulkan permohonan pengaduan konstitusional sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan putusan yang dikabulkan dalam pengaduan konstitusional dari tahun 2018 – 2020

<sup>47</sup> Armin Von Bogdandy and Davide Paris, "Building Judicial Authority: A Comparison between the Italian Constitutional Court and the German Federal Constitutional Court," *Revista Derecho del Estado*, no. 43 (2019): 5–24.

<sup>48</sup> *Bundesverfassungsgericht Report, 2020*

<sup>49</sup> *Bundesgerichtshof/ Federal Court of Justice* menyelesaikan persoalan-persoalan umum yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana. [https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home\\_node.html](https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html), diakses pada tanggal 8 Januari 2022

<sup>50</sup> *Bundesverwaltungsgericht* memiliki kewenangan dalam sengketa administrasi negara, misalnya: perselisihan tentang perencanaan dan pengembangan rute transportasi yang sangat penting (jalan raya, rute kereta api, saluran air, dll, diakses dari <https://www.bverwg.de/rechtsprechung>, pada tanggal 6 Januari 2022.

<sup>51</sup> *Bundessozialgericht (Social court)/* pengadilan masalah sosial. Pengadilan ini menyelesaikan masalah jaminan sosial, seperti program pensiun wajib,

asuransi kecelakaan wajib, asuransi kesehatan wajib, asuransi perawatan jangka panjang, dan lainnya, diakses dari [https://www.bsg.bund.de/EN/Home/home\\_node.html](https://www.bsg.bund.de/EN/Home/home_node.html) pada tanggal 6 Januari 2022.

<sup>52</sup> *Bundesarbeitsgericht/ labour court* memiliki kewenangan terkait pemutusan hubungan kerja, klaim renumerasi, pensiun, dan lainnya, <https://www.bundesarbeitsgericht.de/en/responsibilities/diakses> pada tanggal 7 Januari 2022

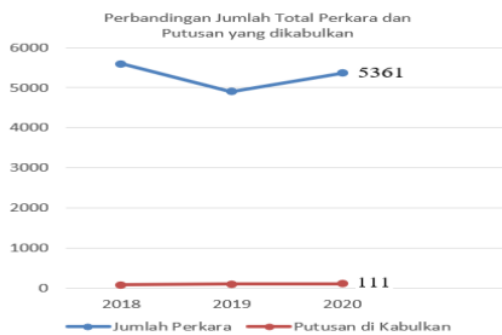
<sup>53</sup> *Bundesfinanzhofs*, menyelesaikan kasus-kasus keuangan, seperti masalah pajak yang tunduk pada undang-undang federal, dan lainnya, <https://www.bundesfinanzhof.de/de/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022

<sup>54</sup> *Bundespatentgericht (Federal Patent Court)* memiliki yurisdiksi untuk keputusan banding terhadap keputusan bagian dan departemen German Patent and Trade Mark Office, diakses dari [https://www.bundespatentgericht.de/EN/Jurisdiction/jurisdiction\\_node.html](https://www.bundespatentgericht.de/EN/Jurisdiction/jurisdiction_node.html), pada tanggal 7 Januari 2022



dalam laporan kinerja Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020:

Diagram 1. Perbandingan Jumlah Perkara dengan Putusan yang dikabulkan



Berdasarkan diagram di atas bahwa putusan pengaduan konstitusional yang dikabulkan pada tahun 2018 sebesar 98 kasus (1.67%), sementara pada tahun 2019 sebanyak 75 kasus (1.54%). Pada tahun 2020, BVerfG mengabulkan permohonan pengaduan konstitusional sebanyak 111 kasus (2.06%). Dalam laporan kinerja BVerfG tahun 2020, terkait dengan putusan pengaduan konstitusional dengan objek sengketa putusan pengadilan pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel.4

Putusan Pengaduan Konstitusional pada tahun 2020, kategori putusan pengadilan

No.	Objek Sengketa Putusan Pengadilan	Jumlah Perkara	Dikabulkan
1.	Civil Courts	1.702	27
2.	Criminal Courts	1.215	35
3.	Administrative Courts	810	20
4.	Social Courts	426	6
5.	Labour Courts	127	3
6.	Finance Courts	131	0
7.	Patent Courts	2	0
8.	Disciplinary court, professional disciplinary tribunals, Federal Court of Justice in Lawyer and Notary Matters	15	1
9.	Land Constitutional Courts	34	0
Total/ Percentage		4.462 (100%)	92 (2,06%)

Berdasarkan data diatas bahwa, secara umum permohonan dikabulkan dalam skema putusan pengadilan dari 111 kasus pada tahun 2020, sebesar 92 putusan (2,06%) dari keseluruhan perkara. Pada

<sup>55</sup> *Court of Justice of the European Union (CJEU)* berwenang menafsirkan undang-undang Uni Eropa untuk memastikannya dan diterapkan dengan cara yang sama di semua negara UE, dan menyelesaikan perselisihan hukum antara pemerintah nasional

tahun 2020, terdapat beberapa putusan pengaduan konstitusional yang menarik untuk dianalisis. Seperti putusan BVerfG No. 2 BvR 2835/17 tentang pengawasan global. BVerfG memutuskan bahwa Undang-Undang Badan Intelijen Federal tidak konstitusional, karena pembuat undang-undang gagal membatasi kekuatan hukum pengawasan asing yang bersifat strategis sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Undang-Undang Dasar Jerman tidak mengizinkan pengawasan global dan menyeluruh.

Kasua lain yang menarik adalah putusan BVerfG No. 2 BvR 859/15 tentang larangan memakai jilbab dalam pelatihan hukum (*legal traineeship*). Pelatihan hukum di Jerman didasarkan pada sistem dua tingkat: setelah menyelesaikan gelar sarjana hukum calon pengacara menjalani program pelatihan praktis dua tahun (pelatihan hukum). Selama pelatihan, peserta pelatihan hukum juga bertugas di pengadilan, melakukan tugas peradilan dan tugas kejaksaan. Kasus ini berkaitan dengan permohonan penggunaan jilbab yang dikenakan oleh seorang mahasiswa hukum pada saat pelatihan hukum. Dalam perintahnya pada 14 Januari 2020, BVerfG menyatakan bahwa larangan mengenakan jilbab bagi peserta pelatihan hukum adalah konstitusional. BVerfG berpendapat bahwa larangan ini berdasarkan netralitas ideologis dan agama negara, berfungsinya sistem peradilan, dan kebebasan negatif pemegang hak fundamental lainnya. Artinya pemerintah dapat menerapkan ketentuan larangan penggunaan jilbab pada saat pelatihan hukum dimaksud.

Namun dalam penelitian ini akan menganalisis lebih dalam putusan pengaduan konstitusional dengan objek sengketa putusan pengadilan, yakni *the European Central Bank/ ECB's asset purchase program case*. Kasus *the European Central Bank/ ECB's asset purchase program cases* berdasarkan putusan BVerfG No. 2 BvR 859/15. Pengaduan konstitusional ini terkait putusan *Court of Justice of the European Union (CJEU)*<sup>55</sup> 11 Desember 2018 (Weiss and Others, C-493/17).

Kasus ini diputuskan pada tanggal 5 Mei 2020 atas *the Public Sector Purchase Programme (PSPP)/ Program Pembelian Sektor Publik* program pembelian obligasi *the European Central Bank (ECB)/ Bank Sentral Eropa*. Putusan ini

(Negara-negara di Uni Eropa) dengan lembaga Uni Eropa, [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu\\_en](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu_en)

mengirimkan 'shock waves' (gelombang kejut)<sup>56</sup>, dan telah menimbulkan kontroversi di dalam negeri Jerman maupun di luar Jerman, banyak orang bertanya-tanya, apakah putusan itu baik atau tidak? (meresahkan).<sup>57</sup> Titik utama putusan ini adalah kurangnya penilaian prinsip proporsionalitas hukum UE dalam kasus ini.<sup>58</sup> Sebagian besar komentar atas putusan tersebut berfokus pada pembangkangannya terhadap Pengadilan (CJEE), konsekuensi bagi hubungan antara kedua pengadilan (BVerfG dan CJEU), serta kemungkinan efek limpahan untuk dialog yudisial (judicial dialogue) di Eropa. Namun, keputusan tersebut juga menyoroti uji proporsionalitas sebagai instrumen untuk membatasi kompetensi.<sup>59</sup>

Dalam putusan tersebut BVerfG menyatakan, untuk pertama kalinya, bahwa putusan lembaga UE tidak sejalan (inkonstitusional) dengan tatanan kompetensi Eropa dan dengan demikian tidak mengikat Negara Jerman. Diputuskan bahwa *Bundesbank* (Bank Jerman Pusat) tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pembelian obligasi atau peningkatan kecepatan pembelian bulanan setelah masa transisi tidak lebih dari tiga bulan, kecuali Dewan Pemerintahan ECB menunjukkan bahwa PSPP memenuhi prinsip proporsionalitas.

Menurut Hakim Konstitusi pada BVerfG periode 1987 - 1999 Dieter Grimm bahwa Pengadilan Jerman telah menolak mengikuti putusan CJEU, sehingga menetapkan 'a bomb under the EU legal order' (bom di bawah tatanan hukum Uni Eropa).<sup>60</sup> Dalam kasus ini, BVerfG telah secara konsisten membangun doktrin mahkamah konstitusi sebagai penjaga tatanan konstitusional nasional Jerman (konstitusi) dan prinsip demokrasi, sekaligus menegakkan pengawasan atas langkah-langkah kebijakan moneter yang diperlukan.<sup>61</sup>

BVerfG telah membuat putusan penting

tentang signifikansi konstitusional dengan implikasi tidak hanya untuk bidang kebijakan khusus yang bersangkutan (Negara Jerman), tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dari kerja sama Negara Anggota di Uni Eropa dan integrasi Eropa secara keseluruhan. Putusan BVerfG mungkin dipandang sebagai duri di mata Mahkamah Agung dan Uni Eropa secara keseluruhan, namun jika ditanggapi secara memadai dapat membantu untuk mereformasi kelemahan tatanan hukum konstitusional Uni Eropa tersebut menjadi lebih baik.<sup>62</sup>

Praktik terbaik BVerfG menjadi model Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia, khususnya untuk perlindungan hak asasi manusia. Itu disebut "ruang jantung Republik" yang layak dihormati. Selain itu, menjadi lembaga independen paling kuat di dunia dengan serangkaian kompetensi dan dampak politik yang sangat besar, dan yurisprudensi yang dipicu oleh proses ini telah menentukan dan mengubah wajah sistem Hukum Jerman (*rule of the game*) nya jelas dan pasti. Warga negara Jerman telah menerima gagasan pengadilan konstitusional di BVerfG dan memandang pengadilan Karlsruhe ini secara positif. Hal ini mungkin disarankan bahwa semacam budaya konstitusional telah diterapkan di Jerman. Warga Jerman meyakini bahwa putusan BVerfG adalah putusan terbaik, dan sesuai dengan jaminan hak fundamental negara yang diatur dalam Konstitusi.

Praktik pengadilan konstitusional BVerfG telah menjadi model bagi mahkamah konstitusi negara lain. Banyak negara asing telah mengadopsi Undang-Undang Dasar dan inovasi yurisprudensi pengadilan. BVerfG bahkan telah mendefinisikan model tandingan positif terhadap Mahkamah Agung Amerika Serikat (*The Supreme Court of United*

<sup>56</sup> Niels Petersen, "Karlsruhe's Lochner Moment? A Rational Choice Perspective on the German Federal Constitutional Court's Relationship to the CJEU after the PSPP Decision," *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 995–1005.

<sup>57</sup> Matthias Goldmann, "The European Economic Constitution after the PSPP Judgment: Towards Integrative Liberalism?," *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 1058–1077.

<sup>58</sup> Franz C. Mayer, "To Boldly Go Where No Court Has Gone before. The German Federal Constitutional Court's Ultra Vires Decision of May 5, 2020," *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 1023–1031.

<sup>59</sup> Niels Petersen and Konstantin Chatziathanasiou, "Balancing Competences? Proportionality as an Instrument to Regulate the Exercise of Competences

after the PSPP Judgment of the Bundesverfassungsgericht," *European Constitutional Law Review* 17, no. 2 (2021): 314–334.

<sup>60</sup> Dieter Grimm, "A Long Time Coming: Special Section: 'The German Federal Constitutional Court's PSPP Judgment'," *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 944–949.

<sup>61</sup> Teresa Violante, "Bring Back the Politics: The PspP Ruling in Its Institutional Context," *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 1045–1057.

<sup>62</sup> Annegret Engel, Julian Nowag, and Xavier Groussot, "Is This Completely M.A.D. (Mutual Assured Destruction)? Three Views on The Ruling of The German FCC on 5th May 2020," *Nordic Journal of European Law* 3, no. 1 (2020): 128–150.

States)<sup>63</sup>. Selain itu BVerfG merupakan sistem pengadilan konstitusional yang paling maju dan mapan daripada negara lain di dunia, kemapanan ini tentu menjadi bentuk implikasi dari putusan-putusan BVerfG.<sup>64</sup> Donald P. Kommers, and Russell A Miller menilai bahwa BVerfG dinilai sebagai pengadilan konstitusional paling kuat di dunia, sekaligus lembaga paling orisinal dan menarik dalam sistem hukum Jerman.

Pandangan bahwa BVerfG merupakan model mahkamah konstitusi terbaik disampaikan juga oleh Andreas Voßkuhle sebagai Presiden BVerfG tahun 2010-2020 bahwa: “selama beberapa dekade terakhir, minat terhadap yurisprudensi BVerfG telah meningkat pesat di kalangan akademisi dan aktor politik dari seluruh dunia. Ini berlaku tidak hanya untuk negara-negara yang bercirikan Eropa Kontinental, tetapi juga untuk negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Amerika. Secara independen, dalam perjalanan reformasi menuju supremasi hukum di banyak negara berkembang dan negara-negara dalam transisi - setidaknya di negara-negara di mana bahasa Inggris adalah bahasa akademik/ kerja - permintaan untuk terjemahan keputusan BVerfG telah muncul. Terjemahan putusan dalam bahasa Inggris ini diinisiasi oleh Konrad-Adenauer-Stiftung.”<sup>65</sup>

Saat ini, edisi terjemahan putusan berbahasa Inggris sangat banyak, terutama putusan yang tergolong *landmark decision* (putusan yang penting), terjemahan lainnya dalam bahasa Spanyol, Portugis, Perancis, serta berbagai bahasa di Eropa Tenggara. Penerjemahan berfokus pada putusan yang berkaitan dengan hak-hak fundamental, yang merupakan bidang penting dari yurisprudensi BVerfG, dan menggambarkan batas-batas antara ruang individu dan masyarakat dan negara. Secara bersamaan, hak-hak fundamental memainkan peran penting bagi partisipasi warga negara - sebagai individu atau kolektif - dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis.

## KESIMPULAN

Pengaduan konstitusi menjadi dasar untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar terhadap tindakan penyelenggara negara yang menyalahartikan konstitusi/undang-undang,

<sup>63</sup> Michaela Hailbronner, “Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: From Anti-Nazism to Value Formalism,” *International Journal of Constitutional Law* 12, no. 3 (2014): 626–649.

putusan MK yang melanggar hak-hak dasar, penyelenggara negara yang wanprestasi terhadap kewajiban konstitusional yang diamanatkan. BVerfG telah menjadi model Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia. BVerfG telah menerima 240.251 (98%) kasus pengaduan konstitusional sejak tahun 1951 (6.000 kasus per tahun), dengan tingkat keberhasilan sekitar kurang lebih 2% dari total putusan (semua objek sengketa). Dari data tersebut objek yang paling banyak disengketakan adalah putusan pengadilan, baik putusan peradilan perdata, putusan peradilan pidana, peradilan administrasi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Negara Bagian. Tingkat putusan yang dikabulkan dalam objek sengketa putusan pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi kurang lebih dari 2% pertahun. Rendahnya putusan yang dikabulkan ini merupakan bukti sangat selektifnya *Bundesverfassungsgericht* dalam memutus sebuah persoalan hukum, dan dari jumlah putusan yang rendah tersebut ternyata banyak putusan yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi di berbagai dunia. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan terjemahan putusan dari Mahkamah Konstitusi negara-negara lain, baik yang menganut sistem hukumnya Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Lembaga Riset dan Inovasi) atas dukungan finansial dalam skema hibah Penelitian Terapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bröhmer, Jürgen. *Landmark Decisions of the Federal Constitutional Court of Germany in the Area of Fundamental Rights*, n.d. www.kas.de.
- Castillo-Ortiz, Pablo. “The Dilemmas of Constitutional Courts and the Case for a New Design of Kelsenian Institutions.” *Law and Philosophy* 39, no. 6 (2020): 617–655. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3>.
- Chakim, M. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik.” *Jurnal Konstitusi* 11,

<sup>64</sup> Palguna, “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights.”

<sup>65</sup> Jürgen Bröhmer, Gisela Elsner, Clauspeter Hill (ed), *Loc.Cit*



- no. 2 (2014): 31–408.
- Chakim, M. Lutfi. “A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions.” *Constitutional Review* 5, no. 1 (2019): 096.
- Collings, Justin. “The Supreme Court and the Memory of Evil.” *Stanford Law Review* 71, no. 2 (2019): 265.
- Dannemann, Gerhard (1994), *Constitutional Complaints: The European Perspective, International and Comparative Law Quarterly*, 43(1)
- Duvan, Ayse Özkan. “Possible Effects of the Constitutional Complaint Mechanism on Human Rights Practices.” *Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul* 45, no. 62 (2013): 29–42.  
<http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuafdi/article/view/5000121143>.
- Engel, Annegret, Julian Nowag, and Xavier Groussot. “Is This Completely M.A.D.?” *Nordic Journal of European Law* 3, no. 1 (2020): 128–150.
- 9 Faiz, Pan Mohamad. “A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court.” *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 103.
- Goldmann, Matthias. “The European Economic Constitution after the PSPP Judgment: Towards Integrative Liberalism?” *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 1058–1077.
- Grimm, Dieter., Mattias Wendel and Tobias Reinbacher., “European Constitutionalism and the German Basic Law”, Anneli Albi and Samo Bardutzky (ed), *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law (National Reports)*, Asser Press, Netherlands, 2019, p.415
- Grimm, Dieter. “A Long Time Coming.” *German Law Journal* 21, no. 8 (2020): 944–949.
- Hailbronner, Michaela. “Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: From Anti-Nazism to Value Formalism.” *International Journal of Constitutional Law* 12, no. 3 (2014): 626–649.
- 6 Kommers, Donald P., and Russell A. Miller. “Das Bundesverfassungsgericht: Procedure, Practice and Policy of the German Federal Constitutional Court.” *Journal of Comparative Law* 3, no. 2 (2008): 194–211.
- 2 Lailam, Tanto., “Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 4, Desember 2020*
- Lailam, Tanto., “Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Peujian Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum, Vol. 12, No. 1, Juni 2021*
- Tanto Lailam, 2021, *Constitutional Complaint (Pelaksanaan Kewenangan Bundesverfassungsgericht Jerman dan Pelembagaan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)*, Laporan Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- Mayer, Franz C. “To Boldly Go Where No Court Has Gone before. The German Federal Constitutional Court’s Ultra Vires Decision of May 5, 2020.” *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 1023–1031. 5
- Nußberger, Angelika., 2019, *The European Court of Human Rights and the German Federal Constitutional Court*, access on [https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/the-echr-and-the-german-constitutional-court\\_angelika-nussberger.pdf](https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/the-echr-and-the-german-constitutional-court_angelika-nussberger.pdf)
- 1 Palguna, I Dewa Gede. “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights.” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 1.
- 4 Petersen, Niels. “Karlsruhe’s Lochner Moment? A Rational Choice Perspective on the German Federal Constitutional Court’s Relationship to the CJEU after the PSPP Decision.” *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 995–1005.
- Petersen, Niels, and Konstantin Chatziathanasiou. “Balancing Competences? Proportionality as an Instrument to Regulate the Exercise of Competences after the PSPP Judgment of the Bundesverfassungsgericht.” *European Constitutional Law Review* 17, no. 2 (2021): 314–334.
- 12 Poli, Sara, and Roberto Cisotta. “The German Federal Constitutional Court’s Exercise of Ultra Vires Review and the Possibility to Open an Infringement Action for the Commission.” *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 1078–1089.
- Preshova, Denis. “The New Roles of Constitutional Courts in the Era of European Integration Erlangung Der Doktorwürde Einer Hohen Rechtswissenschaftlichen Fakultät”,



Universität zu Köln, Germany (n.d.).  
 Seibert-Fort, Anja, “Judicial Independence and Democratic Accountability: The German Function and Legitimacy of the German Federal Court”, in Ernest Hirsch, Balin, Gerhard van der Schyff, Marteen Stremmer (Ed), *European Yearbook of Constitutional Law 2019: Judicial Power: Safeguards and Limit in Democratic Society*, Asser Press and Springer, Berlin-Germany, 2020  
 Tomuschat, Christian, David P. Currie, and Donald P. Kommers. “Basic Law for the Federal Republic of Germany.” *The effects of brief mindfulness intervention on acute pain experience: An examination of individual difference* 1 (2012): 1689–1699. [https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic\\_law-data.pdf](https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf).  
 Violante, Teresa. “Bring Back the Politics: The PspP Ruling in Its Institutional Context.” *German Law Journal* 21, no. 5 (2020): 1045–1057.  
 Von Bogdandy, Armin, and Davide Paris. “Building Judicial Authority: A Comparison between the Italian Constitutional Court and the German Federal Constitutional Court.” *Revista Derecho del Estado*, no. 43 (2019): 5–24.  
 Zoelva, Hamdan. “Constitutional Complaint Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 152–165

**Regulation and Decision:**

Germany, Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949 Last amended on 28 March 2019  
 Germany, Federal Constitutional Court Act in the version of 11 August 1993 (Federal Law Gazette I p. 1473), last amended by Article 2 of the Act of 8 October 2017 (Federal Law Gazette I p. 3546).  
 Germany, The *Bundesverfassungsgericht* judgement 2 BvR 859/15 inter alia  
 Germany, The *Bundesverfassungsgericht* order 1 BvR 2835/17  
 Germany, The *Bundesverfassungsgericht* order number 2 BvR 1333/17

**Internet:**

*Bayerischer Verfassungsgerichtshof*, <https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/bayverfgh/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022  
 Bundesgerichtshof, [https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home\\_node.html](https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html)., diakses pada tanggal 8 Januari 2022  
 Bundesverwaltungsgericht <https://www.bverwg.de/rechtsprechung>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.  
 Bundessozialgericht [https://www.bsg.bund.de/EN/Home/home\\_node.html](https://www.bsg.bund.de/EN/Home/home_node.html) pada tanggal 6 Januari 2022.  
 Bundesarbeitsgericht, <https://www.bundesarbeitsgericht.de/en/responsibilities/>diakses pada tanggal 7 Januari 2022  
 Bundesfinanzhofs, <https://www.bundesfinanzhof.de/de/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022  
 Bundespatentgericht, [https://www.bundespatentgericht.de/EN/Jurisdiction/jurisdiction\\_node.html](https://www.bundespatentgericht.de/EN/Jurisdiction/jurisdiction_node.html), pada tanggal 7 Januari 2022  
 Court of Justice of the European Union (CJEU) [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu\\_en](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu_en)  
*Hamburgisches Verfassungsgericht*, <https://www.hamburgisches-verfassungsgericht.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022  
 Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern <https://www.mv-justiz.de/gerichte-und-staatsanwaltschaften/landesverfassungsgericht/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022  
 Niedersächsischen Staatsgerichtshofs <https://staatsgerichtshof.niedersachsen.de/startseite/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022  
 Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen, <https://www.staatsgerichtshof.bremen.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022  
 Staatsgerichtshof des Landes Hessen, <https://staatsgerichtshof.hessen.de/>  
 Schleswig-Holsteinisches Landesverfassungsgericht <https://www.schleswig->

[holstein.de/DE/Justiz/LVG/lvg\\_node.html](http://holstein.de/DE/Justiz/LVG/lvg_node.html), diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Thüringer Verfassungsgerichtshof, [http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/\\$\\$serviceliste/startseitethverfgh?opendocument&thverfgh&startseite](http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/$$serviceliste/startseitethverfgh?opendocument&thverfgh&startseite), diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg, <https://verfgh.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, <https://verfassungsgericht.brandenburg.de/verfgbbg/de>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, <https://www.berlin.de/gerichte/sonstige-gerichte/verfassungsgerichtshof/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen, <https://www.vgh.nrw.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, <https://verfgh.justiz.rlp.de/de/startseite/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgerichtshof des Saarlandes, <http://www.verfassungsgerichtshof-saarland.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen, <https://www.verfassungsgerichtshof.sachsen.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022

Verfassungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, <https://verfassungsgericht.sachsen-anhalt.de/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

# Pengaduan Konstitusional Jerman - Jurnal HAM

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id">ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://dprexternal3.dpr.go.id">dprexternal3.dpr.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://ekmair.ukma.edu.ua">ekmair.ukma.edu.ua</a> Internet Source	1%
4	Submitted to University of Exeter Student Paper	1%
5	<a href="http://www.springerprofessional.de">www.springerprofessional.de</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Kozep-europai Egyetem Student Paper	1%
7	<a href="http://journal.umi.ac.id">journal.umi.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to London School of Economics and Political Science Student Paper	1%
9	<a href="http://consrev.mkri.id">consrev.mkri.id</a> Internet Source	1%

10	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %
11	www.constitutionalism.gr Internet Source	1 %
12	Submitted to The Honorable Society of King's Inns Student Paper	1 %
13	Submitted to University of Kurdistan Hawler Student Paper	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off